

Subtheme 8: Digital Divide And Democracy

Kesenjangan Sosial: Tantangan Bagi Demokrasi Indonesia

Ignatius Ismanto

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pelita Harapan, Karawaci – Tangerang,
Banten**

ignatius.ismanto@uph.edu

Abstract

Indonesia has made a substantial progress in recovering its economy, especially since the crisis hit the country in 1997. Liberalization of the economy followed by sound and sustainable growth of the economy and flourish of investment has contributed to the recovery. Unfortunately, social inequality remains a social issue and the challenges to the economic change. Social inequality during this often conceived like an iceberg phenomenon. Social disparities indeed is an issue that is multi-dimensional. Social inequalities also must be understood from a political dimension. Lack of access in public policies come into potentially exacerbate social disparities. The widespread practices of corruption became a serious threat in overcoming social disparities. Why corruption is still a serious challenge in the midst of the political changes in Indonesia? Political change in Indonesia were increasingly characterized by the rise of oligarchy (Robison and Hadiz, 2004). Ironically, electoral democracy hasn't been able to bring about change in curbing abuse of power. Social disparities are morally opposed to the ideals of social justice. This paper examines the issue of the social inequality for Indonesia in promoting its democracy.

Keywords: economic inequality, economic liberalization and oligarchy

Pengantar

Indonesia telah mengalami perubahan ekonomi yang mengagumkan selama kurun waktu yang cukup panjang. Selama masa regim otoritarian Orde

Baru Soeharto, Indonesia mampu meraih dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu juga telah mampu mendorong proses akumulasi kapital dalam kurun waktu yang sangat singkat. Negara memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan kapital itu. Kemajuan ekonomi yang mengagumkan itu dimungkinkan oleh dukungan stabilitas politik. Stabilitas politik selama masa pemerintahan Soeharto itu dimungkinkan karena dukungan keterlibatan militer dalam politik. Bahkan selama masa pemerintahan Soeharto, militer dianggap sebagai tulang punggung bagi perubahan politik di Indonesia. Stabilitas politik, dengan demikian, dimungkinkan oleh dukungan regim yang otoritarian. Ironisnya, pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan itu diikuti oleh meluasnya isu kesenjangan ekonomi. Keberhasilan untuk mendorong proses akumulasi kapital tidak diikuti oleh kemajuan yang berarti dalam mendorong pertumbuhan pengusaha-pengusaha kecil dan koperasi.

Kesenjangan ekonomi telah menjadi isu utama yang menyertai perubahan ekonomi global. Kesenjangan ekonomi itu tidak hanya menjadi isu global, yaitu terjadi dalam relasi antar negara. Kesenjangan ekonomi juga berkembang menjadi isu domestik, yang terjadi pada hubungan antar individu dalam suatu negara. Bagi Indonesia, kesenjangan ekonomi tentu bukan-lah isu yang baru. Namun, kesenjangan ekonomi itu berkembang menjadi isu politik yang meluas justru di tengah kemajuan ekonomi yang dramatis. Peristiwa Malari pada pertengahan 1970-an, misalnya, tidak hanya merupakan reaksi terhadap menguatnya dominasi asing terhadap ekonomi nasional, tetapi juga manifestasi terhadap memburuknya isu kesenjangan ekonomi saat itu. Kesenjangan ekonomi masih menjadi isu yang sensitif di tengah perubahan ekonomi-politik Indonesia dewasa ini. Tulisan ini mengkaji tantangan bagi Indonesia dalam mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah perubahan politik dewasa ini.

Negara dan Pembangunan

Ada sejumlah pertanyaan yang menarik dalam mengkaji perubahan sosial bagi negara Dunia Ketiga, yaitu: apakah pembangunan (baca: pembangunan ekonomi) akan mendorong proses demokratisasi, serta bagaimana peran negara dalam pembangunan ekonomi itu? Sejumlah pertanyaan itu merupakan isu-isu yang menarik, khususnya dalam melihat perubahan ekonomi dan tantangan demokrasi bagi negara Dunia Ketiga. Setidaknya ada 3 (tiga) teori pembangunan yang memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi itu, yaitu: (i) Teori Modernisasi, (ii) Teori Negara Pembangunan, dan (iii) Teori Strukturalist-Marxisme. Sub-bab ini menjelaskan pandangan ketiga teori tersebut dalam memandang proses demokratisasi, dan sekaligus menjadi kerangka acuan dalam mengkaji perubahan politik di Indonesia.

Salah satu teori (pemikiran atau pendekatan) yang berpengaruh luas dalam mendorong perubahan sosial Dunia Ketiga adalah teori Modernisasi. Teori ini telah berkembang sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Teori atau pendekatan ini banyak mengadopsi gagasan-gagasan yang dikembangkan oleh (i) teori evolusi yang melihat perubahan sosial bersifat linear dan (ii) teori fungsionalisme yang melihat masyarakat ibarat organisme yang saling mempengaruhi. Teori modernisasi bertolak dari sejumlah asumsi. *Pertama*, teori ini mengelompokkan masyarakat menjadi 2 kelompok (dikotomi), yaitu: (i) masyarakat tradisional, dan (ii) masyarakat modern. Masyarakat tradisional umumnya dicirikan oleh masyarakat yang secara sosial-ekonomi dan politik masih mengalami keterbelakangan. Masyarakat tradisional ini secara ekonomi dicirikan oleh meluasnya kemiskinan serta tajamnya jurang kesenjangan ekonomi dan secara sosial-politik: struktur masyarakatnya dicirikan oleh kuatnya feodalisme dan masyarakatnya bersifat pasif dan apatis. Sedangkan

masyarakat modern dicirikan oleh kemajuan ekonomi, serta sistem sosial yang terbuka dan demokratis. Masyarakat tradisional umumnya merupakan representasi masyarakat Dunia Ketiga, yang umumnya merupakan negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia berakhir. Sedangkan masyarakat modern merupakan negara-negara industri, seperti: negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. *Kedua*, teori modernisasi melihat keterbelangan yang dialami oleh masyarakat umumnya lebih disebabkan oleh faktor internal, yaitu karakteristik yang berkembang dalam masyarakat, seperti: tidak memiliki kapital, tidak menguasai sains dan teknologi, serta pasif-apatis dan sebagainya. Faktor-faktor internal ini sering dianggap tidak mendukung bagi kemajuan. Ketiga, perubahan sosial dipandang bersifat linear. Artinya, masyarakat tradisional dapat berkembang menjadi masyarakat yang maju dan modern. Transformasi itu hanya masalah waktu (timing), asalkan masyarakat tradisional dapat belajar dari pengalaman yang dicapai oleh masyarakat modern. Negara-negara Dunia Ketiga yang terbelakang secara ekonomi itu suatu saat akan menjadi seperti negara-negara maju dan demokratis, seperti negara-negara Barat, asalkan mau belajar dari pengalaman kemajuan yang diraih oleh negara-negara maju itu. Oleh sebab itu, teori modernisasi sering dianggap identik dengan Westernisasi, karena menjadi negara Barat sebagai model bagi kemajuan negara Dunia Ketiga. Ke-empat, teori modernisasi memandang bahwa pembangunan ekonomi merupakan aspek yang penting dalam mendorong perubahan sosial yang lebih luas, termasuk dalam mendorong proses demokratisasi. Sehubungan dengan itu, pembangunan ekonomi dianggap sebagai prasyarat bagi pembangunan demokrasi bagi negara-negara Dunia Ketiga. Pembangunan ekonomi yang dimaksudkan adalah pembangunan ekonomi yang kapitalistik, yang melembagakan menguatkan mekanisme pasar.

Pendekatan lain yang menjelaskan perubahan sosial bagi negara Dunia Ketiga adalah pemikiran atau teori negara pembangunan (*development state*). Teori negara pembangunan berbeda dengan teori modernisasi, khususnya dalam melihat aspek peran pemerintah (negara) dalam pembangunan ekonomi. Bila teori modernisasi melihat pentingnya kekuatan pasar dalam pembangunan ekonomi bagi Dunia Ketiga, sebaliknya, teori negara pembangunan lebih menekankan pada pentingnya peran negara dalam pembangunan ekonomi Dunia Ketiga. Apa alasan yang dibangun oleh teori negara pembangunan dalam melihatnya pentingnya peran negara dalam pembangunan ekonomi itu?. Negara Dunia Ketiga yang umumnya meraih kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua merupakan ekonomi yang terbelakang serta mengalami keterlambatan industrialisasi. Realitas ekonomi Dunia Ketiga berbeda dengan ekonomi negara industri maju, seperti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi serta mengejar keterlambatan industrialisasi yang dihadapi negara Dunia Ketiga tidak mungkin dapat ditempuh seperti cara-cara yang dilakukan oleh negara industri yang ekonominya telah maju. Bagi negara Dunia Ketiga, peran negara sangat-lah penting dalam mengatasi keterbelakangan ekonomi dan keterlambatan industrialisasi mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Gerschenkorn bahwa “semakin terbelakang ekonomi suatu negara dan semakin terlambat industrialisasinya, semakin diperlukan peran dan intervensi negara untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi dan keterlambatan industrilisasinya”.

Konsep negara pembangunan menekankan pentingnya peran negara untuk merumuskan industri yang dipandang strategis untuk dikembangkan, serta menempuh kebijakan ekonomi yang proteksionis untuk melindungi industri strategis yang baru dikembangkan itu. Kebijakan ekonomi yang neo-merkantilistik diperlukan untuk melindungi industri strategis yang baru

berkembang itu dari ancaman persaingan global. Dengan demikian, negara menjadi aktor yang utama dalam pembangunan ekonomi Dunia Ketiga. Mengejar keterlambatan industrialisasi yang dialami Dunia Ketiga tidak-lah mungkin dilakukan dengan mengandalkan pada kekuatan pasar. Industri yang dianggap strategis oleh negara mendapat perhatian yang yang besar. Negara melindunginya, bahkan negara dapat mengalokasikan dana (baca: menyalurkan subsidi) melalui kebijakan moneter maupun fiskal untuk mendorong industrialisasi arahan negara (*state-led industrialization*). Industri yang dibesarkan oleh negara ini-lah yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadapi pasar global, yaitu mewujudkan kepentingan nasional negara. Teori negara pembangunan ini umumnya diperjuangkan oleh kalangan Ilmuwan Politik.

Di samping itu juga ada teori-teori pembangunan yang dibangun dari pemikiran Strukturalist-Marxisme. Pemikiran strukturalist-Marxisme bersifat kritis terhadap gagasan pembangunan ekonomi yang kapitalistik coraknya, yang dipercaya justru hanya akan membawa kemunduran bagi Dunia Ketiga. Pemikiran strukturalist-Marxisme ini memandang bahwa sistem global pada hakekatnya bersifat konfliktual dan eksploitatif. Gagasan pembangunan ekonomi yang memungkinkan integrasi ekonomi Dunia Ketiga dalam sistem global yang semakin kapitalistik dianggap justru akan membawa Dunia Ketiga dalam kemunduran (*under-development*). Pemikiran Strukturalis-Marxisme ini menekankan pentingnya peran negara dalam mendorong pembangunan ekonomi bagi Dunia Ketiga. Peran negara yang dominan dalam ekonomi itu diperlukan untuk mencegah dominasi kekuatan kapital, termasuk kapital asing (kapital internasional) dalam ekonomi nasional suatu negara. Tradisi pemikiran Marxisme pada dasarnya melihat bahwa negara itu dipandang sebagai instrumen kekuatan kapitalis. Ketiga pendekatan atau pemikiran

sebagaimana yang telah dijelaskan itu akan digunakan untuk mengkaji perubahan politik Indonesia

Pembangunan Ekonomi, Otoritarianisme dan Demokrasi

Sulit untuk dibayangkan bahwa krisis ekonomi yang menghatam Indonesia pada 1997 membawa implikasi yang luas. Krisis itu tidak saja mengakhiri regim kekuasaan yang otoritarian, tetapi juga mendorong perubahan politik menuju demokrasi. Krisis ekonomi itu sering dianggap sebagai *blessing in disguise* (suatu rahmat yang tersembunyi). Krisis ekonomi dianggap sebagai faktor yang menarik, khususnya dalam mengakhiri regim kekuasaan Orde Baru Soeharto. Krisis ekonomi tidak saja menghambat dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi krisis itu juga melemahkan legitimasi regim Orde Baru Soeharto yang telah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa. Pertumbuhan ekonomi merupakan kosa kata yang demikian penting bagi perubahan ekonomi Indonesia, khususnya sejak regim Orde Baru berkuasa pada akhir 1960-an. Selama regim kekuasaan Orde Baru Soeharto, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yaitu rata-rata 7 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi itu-pun dapat dipertahankan selama kurun waktu yang cukup panjang, hingga krisis terjadi pada 1997. Bahkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berkesinambungan itu telah memungkinkan terjadinya proses akumulasi kapital yang luar biasa, yaitu lahirnya kalangan kekuatan ekonomi berskala besar. Negara berperan penting dalam mendorong proses akumulasi kapital itu (Robinson, 1985). Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu dianggap tidak mempengaruhi perubahan politik, yaitu mendorong proses demokratisasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga bukan obat mujarab dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan serta kesenjangan sosial yang menyertai perubahan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memiliki dimensi politik yang amat luas. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan itu juga dimungkinkan karena dukungan stabilitas politik. Stabilitas politik dianggap sebagai faktor yang penting bagi pembangunan ekonomi. Secara teoritis, pembangunan ekonomi dipandang sebagai pra-syarat bagi pembangunan demokrasi bagi negara Dunia Ketiga. Proses demokratisasi bagi negara Dunia Ketiga sering dikaitkan dengan keterkaitan antar 3 (tiga) faktor, yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi, (ii) kesenjangan sosial-ekonomi dan (iii) bentuk regim, yaitu: apakah otoritarianisme atau demokrasi. Pada awal pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi diikuti oleh memburuknya kesenjangan sosial-ekonomi. Pada awal pembangunan ekonomi itu, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi bersifat *'trade off'*. Artinya, bila hendak meraih pertumbuhan ekonomi harus mengorbankan kesenjangan sosial-ekonomi. Namun pada titik tertentu dilampaui, pertumbuhan ekonomi itu akan diikuti oleh membaiknya kesenjangan sosial ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi diikuti oleh memburuknya kesenjangan sosial ekonomi dianggap sebagai 'tahap yang sangat rawan' terhadap instabilitas politik. Oleh sebab itu, tahapan ini diperlukan kehadiran regim yang otoriter. Kehadiran regim yang otoriter itu dianggap bersiaft sementara saja (*temporary*). Huntington (1969) menjelaskan bahwa kehadiran regim otoriter itu diperlukan untuk mencegah terjadinya revolusi sosial. Regim otoriter akan berakhir pada saat pertumbuhan ekonomi diikuti oleh membaiknya kesenjangan sosial-ekonomi. Tahapan ini-lah yang menentukan proses demokratisasi.

Pengalaman pembangunan ekonomi selama Orde Baru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan,

bahkan telah diikuti oleh membaiknya kesenjangan sosial ekonomi⁷¹, ternyata tidak diikuti oleh perubahan politik yang berarti dalam mendorong proses demokratisasi, sebagaimana dijelaskan secara teoritis. Mengapa kemajuan ekonomi itu tidak membawa perubahan politik yang berarti dalam mendorong proses demokratisasi? Namun penting untuk dicatat bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1980-an dan 1997 merupakan aspek yang menarik, khususnya dalam melihat perubahan politik di Indonesia. Krisis ekonomi itu oleh kalangan ekonomi sering dianggap sebagai *blissing in disguise*. Krisis ekonomi-lah melemahkan kemampuan dan peran pemerintah dalam menggerakkan ekonomi. Serangkaian liberalisasi ekonomi (baca: deregulasi) ditempuh untuk mengatasi krisis ekonomi itu. Serangkaian deregulasi ekonomi itu telah membawa perubahan ekonomi yang besar, yaitu mendorong internasionalisasi kapital, serta mendorong integrasi ekonomi nasional Indonesia ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Bahkan perubahan ekonomi itu juga membuka peluang bagi tuntutan demokratisasi, yaitu tekanan untuk melembagakan transparansi pengelolaan ekonomi. Tuntutan demokratisasi itu dengan mudah diredam oleh regim otoritarian. Perubahan ekonomi itu ternyata tidak mampu mendorong perubahan politik yang berarti dalam mengakhiri otoritarianisme. Tuntutan demokratisasi itu justru mendorong regim Orde Baru untuk menkonsolidasi kekuasaannya. Ironisnya, kemajuan ekonomi itu justru semakin melanggengkan kelangsungan otoritarianisme.

Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada 1997 benar-benar telah membawa dampak sosial yang luas. Krisis ekonomi yang awalnya dipicu oleh krisis moneter itu tidak saja mengganggu pertumbuhan ekonomi yang selama itu mampu dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang. Tetapi, krisis itu

⁷¹ Lihat laporan World Bank. (1993), *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Washington DC: World Bank

juga melemahkan legitimasi kelangsungan kekuasaan regim Orde Baru. Krisis ekonomi itulah yang memicu krisis politik itulah yang sesungguhnya merupakan faktor yang besar pengaruhnya dalam mengakhiri regim otoritarian Orde Baru, serta membuka peluang bagi demokratisasi. Tanpa krisis ekonomi itu sulit dibayangkan akan terjadi perubahan politik yang demikian luas. Namun, krisis ekonomi yang dialami Indonesia juga membawa dampak sosial yang luas, yaitu: meluasnya kemiskinan serta memburuknya kesenjangan sosial-ekonomi. Akankah perubahan politik dari otoritarian menuju demokrasi juga membawa perubahan ekonomi yang berarti dalam mendorong kemajuan sosial ekonomi masyarakat luas?

Reformasi Politik Pasca Orde Baru

Pertumbuhan ekonomi yang mampu dipertahankan selama kurun waktu yang panjang memang telah membawa sejumlah perubahan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi telah memungkinkan berlangsungnya proses akumulasi kapital. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak mampu menjawab persoalan klasik, yaitu mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Mengapa kemajuan ekonomi tak mampu membawa perubahan yang berarti dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi? Sulit untuk disangkal bahwa *distribution of wealth* , yaitu kemakmuran sangat dipengaruhi oleh akses kekuasaan untuk ikut mempengaruhi kebijakan publik. Persoalan kesenjangan sosial-ekonomi dapat diperburuk oleh berkembangnya struktur kekuasaan yang otoriter dan korup. Sehubungan dengan itu membangun demokrasi merupakan fondasi yang diperlukan dalam memperbaiki kesenjangan sosial ekonomi. Salah satu tantangan politik terbesar dalam membangun demokrasi sejak 1998 yaitu merombak struktur kekuasaan dan politik yang memungkinkan regim Orde Baru mampu berkuasa selama kurun waktu yang panjang. Serangkaian

perubahan politik telah ditempuh, antara lain dengan: (i) menegakkan gagasan supremasi sipil atas militer (*civilian supremacy upon the military*), (ii) mendorong sistem kepartaian dan sistem pemilu yang lebih terbuka, (iii) melembagakan sistem pemilihan presiden secara langsung, dan (iv) membuka kebebasan politik yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengorganisasikan kepentingan mereka.

Gagasan untuk menegakkan supremasi sipil atas militer merupakan elemen yang penting dalam membangun demokrasi. Asumsi dasar pemikiran itu menekankan bahwa demokrasi hanya bisa berkembang bila seluruh elemen bangsa, termasuk militer sebagai institusi yang memiliki kewenangan yang sah untuk menggunakan pemaksaan fisik, tunduk pada kepemimpinan sipil yang dipilih secara demokratis. Gagasan supremasi sipil atas militer ini memang menempatkan militer di bawah sub-ordinasi kepemimpinan sipil. Salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan gagasan itu adalah memberikan pengakuan otonomi terhadap institusi militer. Pengakuan terhadap otonomi militer ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme militer dan mencegah militer dijadikan sebagai alat bagi persaingan kekuasaan. Gagasan supremasi sipil atas militer akan menjadikan militer yang semakin profesional (*militarizing the military*). Fungsi utama militer adalah menjaga negara dari ancaman fisik, baik dari luar maupun dari dalam. Profesionalisme militer akan menjadikan militer sebagai 'alat negara'. Profesionalisme militer sekaligus akan mencegah militer menjadi 'alat kekuasaan'. Gagasan supremasi sipil atas militer ini menjadi acuan ditempuhnya reformasi militer (TNI) sejak berakhirnya regim Orde Baru, seperti: mengakhiri representasi politik militer dalam parlemen, militer tidak lagi terlibat dalam politik persaingan kekuasaan.

Liberalisasi politik merupakan aspek lain yang menarik dalam mendorong proses demokratisasi sejak 1998. Liberalisasi politik telah

memungkinkan tumbuhnya partai-partai politik baru, yang sekaligus mengakhiri sistem kepartaian yang hegemonik⁷² yang berkembang kuat selama masa Orde Baru Soeharto. Perubahan politik pasca Orde Baru yang dipicu oleh liberalisasi politik ini telah memungkinkan peran partai politik semakin penting dalam kehidupan demokrasi. Partai politik menjadi instrumen penting dalam persaingan kekuasaan, baik dalam pemilu untuk DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), maupun dalam pemilihan presiden. Perubahan politik itu telah menempatkan partai dan parlemen menjadi lokus persaingan kekuasaan yang penting. Sistem pemilu yang lebih terbuka dan lebih kompetitif dan diikuti oleh sistem multi-partai selalu memberikan gambaran tentang tingginya fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Bahkan, sistem multi-partai yang berkembang ditengah dorongan untuk melembagakan sistem demokrasi presidensiil juga mempengaruhi dinamika yang menarik dalam perkembangan politik di Indonesia. Pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali diperkenalkan pada 2004 dan selalu diikuti oleh banyak partai politik selalu menghasilkan apa yang disebut dengan '*minority goverment*'. Minority government yang dimaksudkan disini adalah presiden yang meraih dukungan mayoritas suara dalam pemilihan presiden secara langsung, tetapi presiden terpilih itu tidak memiliki dukungan politik yang kuat dalam parlemen. Dalam memperoleh dukungan politik di parlemen, minority

⁷² Sistem kepartaian yang hegemonik yang dimaksud dalam tulisan ini merupakan sistem yang memungkinkan partai tertentu, yaitu Golkar selama masa Orde Baru Soeharto meraih mayoritas suara dalam penyelenggaraan pemilu dan berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, hingga 5-7 kali dalam penyelenggaraan pemilu secara berturut-turut. berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, hingga 5-7 kali dalam penyelenggaraan pemilu secara berturut-turut. Golkar dalam masa Orde Baru Soeharto dapat dipakai untuk menggambarkan partai yang hegemonik. Fenomena itu bukan hanya kekhususan Indonesia. LDP (Liberal Democratic Party) di Jepang juga sering digambarkan sebagai partai hegemonik.

government cenderung mendorong pembentukan ‘koalisi kabinet’. Koalisi partai-partai dalam kabinet yang dibangun tanpa kesamaan ideologi atau program partai cenderung juga rentan terhadap politik transaksional.

Aspek perubahan politik lainnya yang menarik sejak 1998 adalah melemahnya praktek-praktek korporatisme . Korporatisme secara umum diartikan sebagai sistem pengaturan yang ditempuh negara terhadap kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. MacIntyre (1994, hal. 1) menjelaskan bahwa “*corporatism refers to a pattern of state-society relations in which the state plays the leading role in structuring and regulating interest groups, organising them along functional rather than class lines (in order to minimise both collaboration and conflict), and typically granting official recognition to only one representative body in any given sector*”. Apa yang menarik dari korporatisme ini adalah bahwa negara memainkan peran yang penting dalam mengatur dan mengorganisir kepentingan-kepentingan yang berkembang dalam masyarakat . Dalam mengelola kepentingan yang berkembang dalam masyarakat itu, negara memberi pengakuan, bahkan bila perlu membentuk institusi di setiap sektor, sebagai satu-satu institusi yang dianggap sah dalam mewakili kepentingan masyarakat. Dalam sistem politik yang otoritarian, pembentukan institusi korporatisme itu lebih merupakan strategi bagi negara untuk mengendalikan masyarakat daripada sebagai sarana bagi masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Bahkan, strategi korporatis ini dapat digunakan untuk memecah belah kekuatan-kekuatan yang berkembang dalam masyarakat (divide and rule strategy). Strategi korporatisme, karena itu, membawa dampak yang luas, yaitu melemahkan kekuatan-kekuatan masyarakat dan menjadi tantangan serius bagi pembangunan demokrasi.

Oligarkhi Politik dan Kesenjangan Ekonomi

Liberalisasi politik sejak 1998 telah mendorong perubahan politik yang dramatis sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Ironisnya, perubahan politik yang dramatis itu belum mampu mendorong pembangunan demokrasi secara substansial. Kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi tantangan di tengah pemulihan krisis sejak 1997. Bahkan yang lebih mencemaskan, praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan masih sulit dikendalikan di tengah perubahan politik itu. Mungkinkah demokrasi bisa ditegakkan ditengah menguatnya praktek-praktek korupsi?. Mungkinkah pemberantasan kemiskinan dan perbaikan kesenjangan sosial-ekonomi dapat ditempuh tanpa didukung oleh sistem demokrasi?

Perubahan politik pasca Orde Baru telah diikuti oleh kecenderungan meningkatnya persaingan politik yang tajam. Dalam iklim politik yang semakin kompetitif, partai politik kini merupakan institusi politik modern yang memainkan peran yang penting dalam persaingan kekuasaan. Bahkan, parlemen pasca Orde Baru-pun menjadi lokus persaingan kekuasaan. Namun, pada saat yang sama masyarakat luas-pun sering merasa kecewa terhadap partai dan parlemen, mengingat semakin meningkatnya elit-elit politik yang terlibat dalam berbagai kasus penyalah-gunaan kekuasaan. Masyarakat luas-pun mempertanyakan: memperjuangkan kepentingan siapakah sesungguhnya partai-partai politik dan parlemen itu? Apakah mereka benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat pemilih yang menjadi basis konstituen mereka, ataukah jangan-jangan mereka lebih memperjuangkan kepentingan partai atau hanya menjadi sarana untuk memperjuangkan kepentingan kapital?

Aspek lain yang menarik dari perkembangan kepartaian di Indonesia adalah masalah pendanaan keuangan partai seiring dengan meningkatnya persaingan politik yang semakin tajam. Persaingan politik yang tajam itu telah mendorong meningkatnya biaya politik di Indonesia. Biaya politik yang besar ini menjadi tantangan bagi partai-partai politik dalam membiayai kegiatan

politik mereka, terlebih seiring dengan semakin terbatasnya sumber-sumber keuangan yang tersedia. Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan partai umumnya diperoleh dari (i) iuran anggota, (ii) sumbangan dari perusahaan, dan (iii) subsidi yang disalurkan pemerintah melalui anggaran negara. Subsidi dari pemerintah umumnya merupakan sumber utama pendanaan partai-partai politik di Indonesia. Namun sejak 2001, pemerintah telah melakukan pengurangan subsidi dalam membiayai kegiatan partai. Pengurangan subsidi untuk pendanaan partai ini membawa dampak yang serius bagi partai-partai politik dalam membiayai kegiatan mereka. Sebagaimana dijelaskan Mietzner (2007) bahwa *“Parties are now increasingly encouraged to seek their own funding, which they do by intensifying their internal and external fund-raising activities. These efforts include asking their legislators for increased contributions, exploiting alternative state funds, selling nominations for public office to affluent non-party figures and, most recently, establishing party-owned companies”*. Bahkan upaya pencarian dana itu dapat memperburuk gambaran tentang partai politik yang demikian rentan terhadap korupsi.

Perubahan politik yang diikuti oleh persaingan politik yang tajam dan biaya politik yang semakin tinggi itu justru telah mendorong kekuatan kapital untuk masuk dalam arena politik. Siapakah kekuatan kapital itu? Mereka itu umumnya berkembang selama masa regim Orde Baru Soeharto, mereka secara ekonomi berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi. Dalam konteks perubahan politik ini, mereka juga sering disebut dengan ‘kekuatan lama’ yang mampu memanfaatkan perubahan politik pasca Orde Baru. Robison dan Hadiz (2004) menjelaskan bahwa kekuatan lama itu telah membajak reformasi politik yang diperjuangkan sejak jatuhnya regim Orde Baru. Apa motivasi mereka masuk dalam arena politik? Kemungkinan besar mereka itu berkepentingan untuk mengamankan kegiatan bisnis-ekonomi mereka. Akses terhadap

kekuasaan menjadi faktor yang penting dalam mewujudkan kepentingan ekonomi mereka. Masuknya kekuatan kapital dalam arena politik itu menyuburkan perkembangan politik Indonesia yang oligarkhis. Winters (2018) menilai bahwa demokrasi yang dikuasai oleh kekuatan oligarkhi hanya akan menjauhkan cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Bagaimana perkembangan politik yang oligarkhi di tengah tantangan perubahan ekonomi Indonesia dewasa ini menjadi kendala yang serius dalam memperbaiki kesenjangan sosial-ekonomi?. Bagi kalangan teori modrnisasi dan teori negara pembangunan selalu menekankan pada pentingnya pelembagaan transparansi pengelolaan ekonomi seiring dengan terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi yang lebih luas. Kegagalan untuk mendorong transparansi pengelolaan ekonomi hanya akan menyuburkan kegiatan perburuan rente. Dalam ekonomi Indonesia telah berubah, yaitu semakin terintegrasi ke dalam sistem global, kegiatan perburuan rente itu hanya akan semakin menyuburkan praktek-praktek penyalah-gunaan kekuasaan. Sayangnya, kekuatan-kekuatan masyarakat (*civil society*) yang belum terbangun masih menjadi tantangan dalam membangun transparansi pengelolaan ekonomi itu. Sehubungan dengan itu, menguatnya oligarkhi politik tanda didukung oleh transparansi dalam pengelolaan ekonomi hanya akan membawa manfaat bagi segelintir orang yang kaya saja. Sebaliknya, bagi kalangan Strukturalist-Marxist melihat bahwa integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem global yang kapitalistik dan eksploitatif dipandang tidak akan mendorong kemakmuran rakyat.

Refensi Bacaan:

MacIntyre, Andrew .1994. "Organising Interests: Corporatism in Indonesian Politics". Murdoch University. *Working Paper No.43*

- Mietzner, Marcus. 2007. "Party Financing in Post-Soeharto Indonesia: Between State Subsidies and Political Corruption". *Contemporary Southeast Asia*. Vol. 29, No. 2.
- Robison, Richard dan Vedi R Hadiz. 2004. *Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market*. London and New York: Routledge.
- Winters, Jeffry. 2018. "Demokrasi Indonesia di Bawah Kendali Oligarki". Diunggah dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/148526-demokrasi-indonesia-di-bawah-kendali-oligarki>, pada 1 November 2018, jam 15.26.